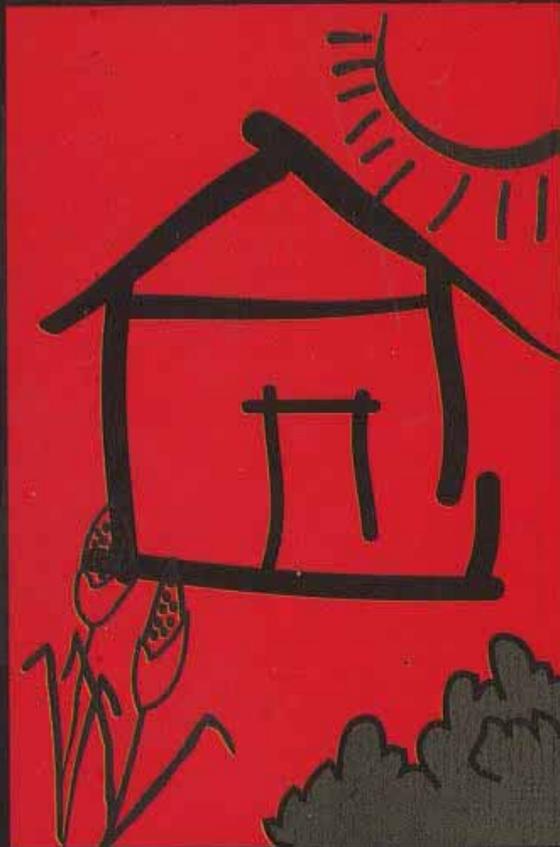
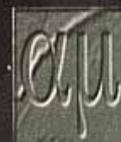


MENYAMBUT ULANG TAHUN KE-70 PROF. SAJOGYO

Garis Kemiskinan **DAN** Kebutuhan Minimum Pangan



S A J O G Y O

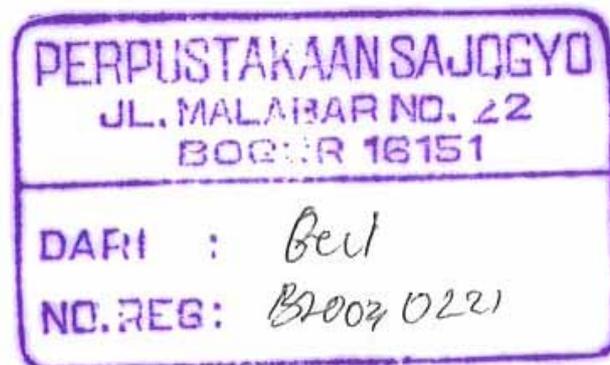


**GARIS KEMISKINAN DAN KEBUTUHAN
MINIMUM PANGAN**

MENYAMBUT ULANG TAHUN KE-70 PROF. SAJOGYO

GARIS KEMISKINAN DAN KEBUTUHAN MINIMUM PANGAN

Oleh Sajogyo



Diterbitkan untuk Yayasan Agro Ekonomika

Aditya Media



Yogyakarta

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sajogyo

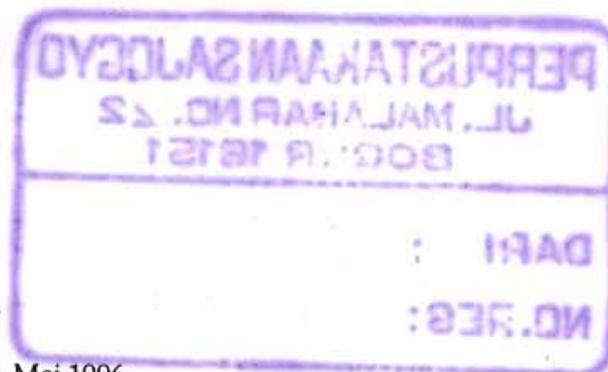
Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan/Sajogyo;
Yogyakarta, Aditya Media, 1996.

vi+ 11; 21cm

ISBN 979-593-062-7

1. Kemiskinan

I. Judul



Cetakan pertama, Mei 1996

Diterbitkan untuk Yayasan Agro Ekonomika

Oleh:

Aditya Media

Jalan Raya Janti 3A, Yogyakarta 55281

Tlp. (0274) 566678, 580777, 580778

Fax. (0274)560789, 583259

DARI PENERBIT

Kalau ada sebuah nama yang hampir tidak bisa ditinggalkan ketika orang berbicara atau menulis tentang masalah kemiskinan, maka nama itu adalah nama Prof. Dr. Ir. Sajogyo. "Garis Kemiskinan Sajogyo" yang didasarkan pada konsumsi pangan penduduk menjadi terlebih penting apabila diingat bahwa tinggi rendahnya gizi mempunyai kaitan erat dengan tingkat inteligensia. Dengan dasar ini maka perbaikan gizi menduduki tempat penting dalam pembangunan bangsa. Hanya bangsa yang intelijenlah yang akan *survive* dalam ajang persaingan global.

Dengan meletakkan garis kemiskinan pada ambang kecukupan pangan maka Prof. Sajogyo dengan tegas telah berhasil menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang harus segera ditanggulangi. Masalah kemiskinan adalah masalah yang erat kaitannya dengan keselamatan bangsa. Rakyat yang miskin akan selalu merupakan beban yang mengganduli perjalanan bangsa. Kalau sistem pengentasannya tidak segera ditemukan maka bisa terjadi bangsa ini akan terjungkir dalam perjalanannya itu. Ini bisa dilihat pada bekas negara-negara Uni Soviet.

Sebagai tokoh yang pertama kali berbicara mengenai kebutuhan minimum pangan sebagai dasar penarikan garis kemiskinan, sungguh tepat bila ulangtahunnya diperingati dengan menerbitkan kembali karyanya yang sangat penting mengenai masalah ini. Karyanya ini merupakan sebuah karya pemancing (*seminal work*), yang memancing munculnya tulisan-tulisan semacam yang semakin memperjelas perspektif kemiskinan di Indonesia, yang pada gilirannya memunculkan berbagai gagasan serta program untuk penanggulangannya. Aditya Media sebagai penerbit yang banyak menerbitkan buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah pembangunan desa dan kemiskinan sangat berterima kasih diberi kepercayaan untuk menerbitkan makalah ini dalam rangka menyambut ulang tahun ke-70 Bapak Profesor Sajogyo. Akhirnya kami ucapkan: Selamat panjang umur dalam kehidupan yang penuh makna.

ADITYA MEDIA

PENGANTAR

Antara tahun-tahun 1973—1975 (8-10 tahun setelah terjadinya G-30-S/PKI), masyarakat Indonesia termasuk kalangan Ilmuwan masih “ada masalah” dengan istilah kemiskinan. Hasil penelitian ekonomi-antropologi tentang kemiskinan di Desa Srihardjo - Imogiri - Yogyakarta oleh D.H. Penny dan Masri Singarimbun pada tahun 1973 batal terbit di Indonesia karena masih dianggap “kurang pas” bagi suasana politik-budaya Indonesia. Hasil laporan ini lalu terbit di Universitas Cornell Amerika Serikat.

Dalam suasana seperti itulah Prof. Sajogyo meng“otak-atik” hasil penelitiannya tentang program perbaikan gizi keluarga (UPGK), yang tentu saja ada implikasinya bagi deskripsi tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka dengan menggunakan data-data fisik konsumsi pangan penduduk di Jawa dan laporan data SUSENAS dari BPS 1969/1970 - 1976 ditemukanlah satu garis bagi penduduk yang dapat dipakai sebagai batas antara mereka yang “miskin” dan “tidak miskin”. Inilah untuk pertama kali peneliti Indonesia memberanikan diri berbicara tentang kemiskinan di Indonesia. Dan sesudah itu dalam waktu yang relatif singkat “Garis Kemiskinan Sajogyo” menjadi terkenal di Indonesia dan di luar Indonesia.

Karena sifat kepeloporan konsep garis kemiskinan dari Prof. Sajogyo inilah, maka artikel asli yang mula-mula terbit sebagai tulisan ilmiah-populer di *Kompas* tanggal 17 Nopember 1977 ini kami anggap perlu dicetak kembali dan dibaca oleh ilmuwan-ilmuwan muda kita khususnya dalam kesempatan baik perayaan Ulang Tahun ke 70 Bapak Profesor Sajogyo. Tulisan lain Prof. Sajogyo yang erat sekali kaitannya dengan tulisan ini adalah Kata Pengantar Penerbitan Buku *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Srihardjo di Pedesaan Jawa* (Bhratara Karya Aksara, Buku Obor, 1976), monograf D.H. Penny dan Masri Singarimbun (Cornell, 1973).

Kepada pimpinan Kompas-Gramedia yang mendukung ide ini, kami Yayasan Agro Ekonomika mengucapkan banyak terima kasih. Pengetikan kembali naskah dilakukan oleh Ir. Haryono, untuk itu juga disampaikan penghargaan.

Jakarta, 10 Mei 1996

Mubyarto
Ketua YAE

GARIS KEMISKINAN DAN KEBUTUHAN MINIMUM PANGAN

Oleh Sajogyo

Beragam alternatif ukuran garis kemiskinan yang diajukan H. Esmara (Universitas Andalas) hanya memakai ukuran "di bawah rata-rata". Yaitu angka: (a) konsumsi beras (kg per orang); (b) konsumsi 9 bahan pokok; (c) pengeluaran rumah tangga (Rp/orang); dan (d) konsumsi kalori dan protein/orang/hari (secara terpisah) dengan membedakan nilai rata-rata menurut Jawa dan lain daerah, dan desa atau kota.

"Di bawah rata-rata" itulah yang disebut "miskin". Tetapi masih ada alternatif lain yang lebih tepat, yaitu di bawah 50% median.

Kekurangan pada cara/ukuran relatif tersebut ialah, garis kemiskinan itu tidak dihubungkan dengan keperluan pokok, paling tidak keperluan pangan di mana patokannya makin mantap. Yaitu berdasar susunan umur/sex rumah tangga, jenis pekerjaan, dan sebagainya, berkat penelitian WHO/FAO.

Juga, cara dari segi kebijaksanaan. Cara itu belum dapat menunjukkan bagaimana dan berapa besarnya biaya usaha meng-

Artikel ini aslinya diterbitkan dalam harian Kompas, 17 Nopember 1977 dan kemudian diterbitkan dalam buku *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia* (Gramedia, 1982). Dicitak lagi di sini atas izin dan bantuan Penerbit Gramedia.

atasi kemiskinan itu oleh "masyarakat luas" dan oleh golongan miskin tersebut!

Distribusi pendapatan juga tak menyinggung "keperluan pokok pangan" sesuai keperluan tiap orang/rumah tangga. Pertanyaan: Jika distribusi makin baik, apakah yang miskin sudah "mentas" dari kekurangan pangan? Pertanyaan itu belum terjawab.

Dua Ciri

Di bawah ini kami usahakan merinci "garis kemiskinan" yang punya ciri-ciri: (a) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi "nilai ambang kecukupan pangan" (*food threshold*); (b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein).

Garis kemiskinan ciri pertama dinyatakan dalam Rp/bulan, dalam bentuk "ekuivalen nilai tukar beras" (kg/orang/bulan) agar dapat saling dibandingkan nilai tukar antar daerah dan antar-jaman (NFI, Rp-tahun 1970 dan Rp-tahun 1976, dan seterusnya), sesuai dengan harga beras setempat.

Memakai data tingkat pengeluaran rumah tangga dinilai lebih tepat karena: (a) dalam survei data ini dapat lebih tepat dilaporkan dibandingkan dengan angka "penghasilan"; (b) sudah mencakup penghasilan bukan uang, pemakaian tabungan masa lalu, pinjaman, pemberian barang modal yang "dimakan", mekanisme transfer penghasilan di lingkungan masyarakat tersebut; (c) data dari BPS, mulai banyak tersedia (sampel besar). Dan lebih baik lagi jika mencakup data selama minimal satu tahun penuh.

Hasilnya, klasifikasi berupa:

- a) Untuk pedesaan: (1) miskin = pengeluaran rumah tangga di bawah 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun; (2) miskin sekali = pangan-tak-cukup di bawah 240 kg nilai tukar beras/orang/tahun; (3) paling miskin dengan pengeluaran di bawah 180 kg nilai tukar beras/orang/tahun.
- b) Untuk kota: (1) miskin = pengeluaran rumah tangga di bawah 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun; (2) miskin

sekali: di bawah 380 kg nilai tukar beras/orang/tahun; (3) paling miskin: di bawah 270 kg nilai tukar beras/orang/tahun.

Lapisan pengeluaran rumah tangga "240 kg - 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun" di desa disebut lapisan ambang kecukupan pangan. Rumah tangga dalam lapisan ini dapat mencapai kebutuhan pangan (kalori-protein).

Untuk kota lapisan pengeluaran "360 kg - 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun" dapat mencapai kecukupan pangan pula, yaitu mendekati patokan 1.900 kalori dan 40 gram protein/orang/hari (rekomendasi netto sesuai susunan penduduk Indonesia dan patokan FAO/WHO tahun 1971).

Contoh (Data Susenas, 1967/1970)

- a) Di desa: golongan pengeluaran rumah tangga Rp 751 - Rp1.000/orang/bulan (= 240 - 380 kg beras/orang/tahun).

Dari tingkat konsumsi 1.620 kalori dan 31,5 gram protein, seharga Rp 23,29/orang/hari melalui program perbaikan diet dapat mencapai 1.858 kalori/40,2 gram protein, seharga Rp 27,57/orang/hari (= tambah 16%). Yaitu dengan menambah 200 kalori dari tambahan beras atau jagung atau ubi-ubian, sesuai susunan diet rumah tangga lapisan tersebut dengan nilai per 1.000 kalori—Rp 9,72 dan menambah 100% konsumsi ikan dan kacang-kacangan.

Ikan menjadi 40 kalori per 8,0 gram protein (Rp 2,72) dan kacang-kacangan 34 kalori per 2,6 gram protein, seharga Rp 1,50. Itulah sumber protein di luar sereal yang paling murah bagi mereka.

Pengeluaran untuk makanan menjadi Rp 27,05 dari semula Rp 23,29 per orang/hari. Ditambah dengan pengeluaran bukan pangan Rp 5,81/orang/hari, maka setelah perbaikan untuk kecukupan pangan pengeluaran total menjadi Rp 32,89/orang/hari atau 316 kg nilai tukar beras/orang/tahun.

Hanya rumah tangga dekat batas 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun dapat mencapai kecukupan pangan, jika terhadap mereka dilakukan perbaikan pangan dengan cara tersebut. Diet yang diperbaiki pada rumah tangga lapisan tersebut berarti bahan pangan pokok 441 gram ekuivalen kalori beras/orang/hari dengan 84% beras + jagung.

Di desa lapisan berikutnya yaitu lapisan dengan pengeluaran Rp 1.000 - Rp 1.250/orang/bulan, rata-rata mencapai 433 gram ekuivalen (kalori) beras/orang/hari (89% beras + jagung). Ini merupakan bahan perbandingan yang menarik.

- b) Di kota: golongan pengeluaran rumah tangga Rp 1.251 - Rp 1.500/orang/bulan (= 360 kg - 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun).

Dari tingkat konsumsi 1.426 kalori per 32,3 gram protein, seharga Rp33,41/orang/hari dengan program perbaikan diet dapat mencapai 1.826 kalori/43,8 gram protein, seharga Rp42,01/orang/hari. Yaitu dengan menambah 400 kalori dari tambahan beras atau jagung atau ubi-ubian sesuai pola diet mereka: seharga Rp 12,87/1.000 kalori dan menambah 100% konsumsi ikan dan kacang-kacangan.

Ikan menjadi 18 kalori per 4,0 gram protein (Rp 3,72) dan kacang-kacangan 62 kalori/4,2 gram protein (Rp 3,18/orang/hari).

Perbaikan diet tersebut berarti tambahan biaya pangan 26%. Dengan pengeluaran bukan-pangan Rp 12,17/orang/hari total pengeluaran menjadi Rp 54,18/orang/hari atau 473 kg nilai tukar beras/orang/tahun. Ini sudah dekat sekali pada batas 480 kg/orang/tahun nilai tukar beras. (Waktu itu beras di kota ditaksir seharga Rp 41,25/kg atau 10% lebih mahal dari di desa Rp 37,50/kg). h\$2

Diet yang diperbaiki pada lapisan "360 - 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun" itu berarti bahan pangan pokok

415 gram ekuivalen kalori beras/orang/hari dengan 96% beras + jagung.

Lapisan lebih atas berikutnya ternyata hanya mencapai bahan pangan pokok 366 gram ekuivalen/orang/hari (95% beras + jagung). Ini masih lebih rendah menurut patokan gizi walaupun daya beli lebih tinggi.

Cara ini memang “normatif”! Bukankah di situ jelas peranan pendidikan gizi (dalam 10 segi PKK misalnya)?

Perbaikan pasaran dan peningkatan hasil pangan tetap diperlukan peranannya. Terutama untuk tiga jenis bahan pangan pokok sumber karbohidrat tersebut, ikan dan kacang-kacangan; di situlah serentak prioritas pertambahan produksi pangan diperlukan.

Cara lain menghitung *minimum cost diet* adalah dengan *linear programming* berdasar data mentah di BPS.

Cara Lain

Dua cara lain menemukan “garis jenuh pangan” (=kecukupan) diberikan oleh Huizenga dan Sundrum.

- a) Huizenga (1958) membanding tingkat pengeluaran rumah tangga (per rumah tangga/bulan) dengan konsumsi kalori/orang/hari dari buruh perkebunan besar di Jawa berdasar survei 1939/40: (lihat grafik di bawah).

Pada tingkat pengeluaran rumah tangga 10 Gulden/ rumah tangga/bulan mulai kejenuhan pada tingkat 1950 kalori/orang/hari. Itu sama dengan pengeluaran 373 kg/orang/tahun nilai tukar beras (harga beras 7 sen Gulden/kg).

Huizenga menganjurkan tingkat upah atau penghasilan untuk rumah tangga 5 orang kuli senilai 234 kg/orang/tahun nilai tukar beras di Jawa Tengah atau Jawa Timur (75% untuk makanan, senilai 244 kg nilai tukar beras/orang/tahun) dengan 450 gram beras/orang/hari.

Beberapa standar budget dan diet disusunnya juga, berdasar pola makanan dan pengeluaran rumah tangga golongan kuli itu.

- b) Sundrum (*BIES*, July 1977) pada rumah tangga kota di Jawa menghubungkan persentasi pangan dari pengeluaran rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rumah tangga/orang/bukan. Ia membuatnya dalam skala log.

Dia menemukan bahwa mulai tingkat pengeluaran makanan 75% (dari total) makin tinggi tingkat pengeluaran terlihat jelas angka persen pangan itu menurun. Ini bertepatan dengan tingkat pengeluaran Rp 3.500/orang/bulan, atau jika harga beras Rp 120/kg, tingkat pengeluaran 341 kg nilai tukar beras/orang/tahun.

Sebagai perbandingan: menurut ukuran "kecukupan pangan" (yang kami usulkan konsepsinya di sini) kecukupan kalori itu pada rumah tangga kota di Jawa (1976) lebih dekat pada tingkat pengeluaran Rp 4.000/orang/bulan atau pada 400 kg nilai tukar beras/orang/tahun. Dengan lain perkataan pada lapisan "360 - 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun".

Beberapa Persoalan

Masih ada beberapa persoalan pada konsepsi garis kemiskinan yang dibuat beragam itu, yaitu:

- a) Harga beras yang mana dipakai untuk ukuran? Mungkin paling tepat harga beras yang dibeli oleh golongan/lapisan ambang kecukupan pangan! Sayang, BPS dalam seri harga pangan di pedesaan di Jawa hanya mengumumkan harga beras "sedang", juga sekarang memilih "beras giling I". Umumnya lebih tepat jika harga yang dipakai harga beras yang dibeli tiap rumah tangga.
- b) Rumah tangga di desa dan di kota masih perlu dirinci pada tiap lapisan pengeluaran rumah tangga, sebaiknya berupa data per kapita per bulan.

- c) Jika data terbatas, sebaiknya dipakai data bulan-bulan paceklik (ukuran konsumsi rendah/kritis) yaitu bulan Desember sampai Pebruari (sebelum panen besar padi). Dalam hubungan ini lebih tepat dipakai ukuran pengeluaran rumah tangga dengan "kg nilai tukar beras per orang per bulan" ("bukan per orang per tahun").

Di Desa Lamban

Hasil perhitungan berdasar 3 garis kemiskinan itu dengan membandingkan Januari - April 1970 dengan Januari - April 1976 terlihat bahwa dalam masa 6 tahun yang lalu:

- a) di kota nyata ada perbaikan hidup, penduduk miskin berkurang nyata;
- b) sebaliknya di desa tidak banyak berubah (3% dari 55 ke 52%) angka % miskin itu. Jumlah penduduk miskin "belum cukup pangan" tetap 35%. Di desa Jawa dan daerah lain secara mutlak jumlah penduduk miskin telah bertambah (lihat tabel I).

Penelaahan Sundrum (*BIES*, Juli 1977) juga menyatakan adanya perbaikan tingkat hidup rumah tangga kota di Jawa yang menyolok, disertai pola distribusi pendapatan yang makin tidak merata.

Perbaikan itu terutama pada lapisan atas, umumnya dengan pergeseran dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan-pangan.

Jurang Kemiskinan di Jawa

Jurang kemiskinan (*poverty gap*), yaitu perbedaan antara tingkat penghasilan (=pengeluaran) kini dan tingkat pengeluaran "tak miskin" untuk Jawa pernah kami hitung sebesar 16,1% dari penghasilan total "daerah Jawa" (Sajogyo: *Evaluasi UPGK*, 1972/1973).

Di tabel II di bawah diperkirakan untuk 1975/1976, berdasar data pengeluaran rumah tangga Januari - April 1976 (BPS), untuk Jawa, daerah lain, dan Indonesia, tentang adanya jurang kemiskinan itu.

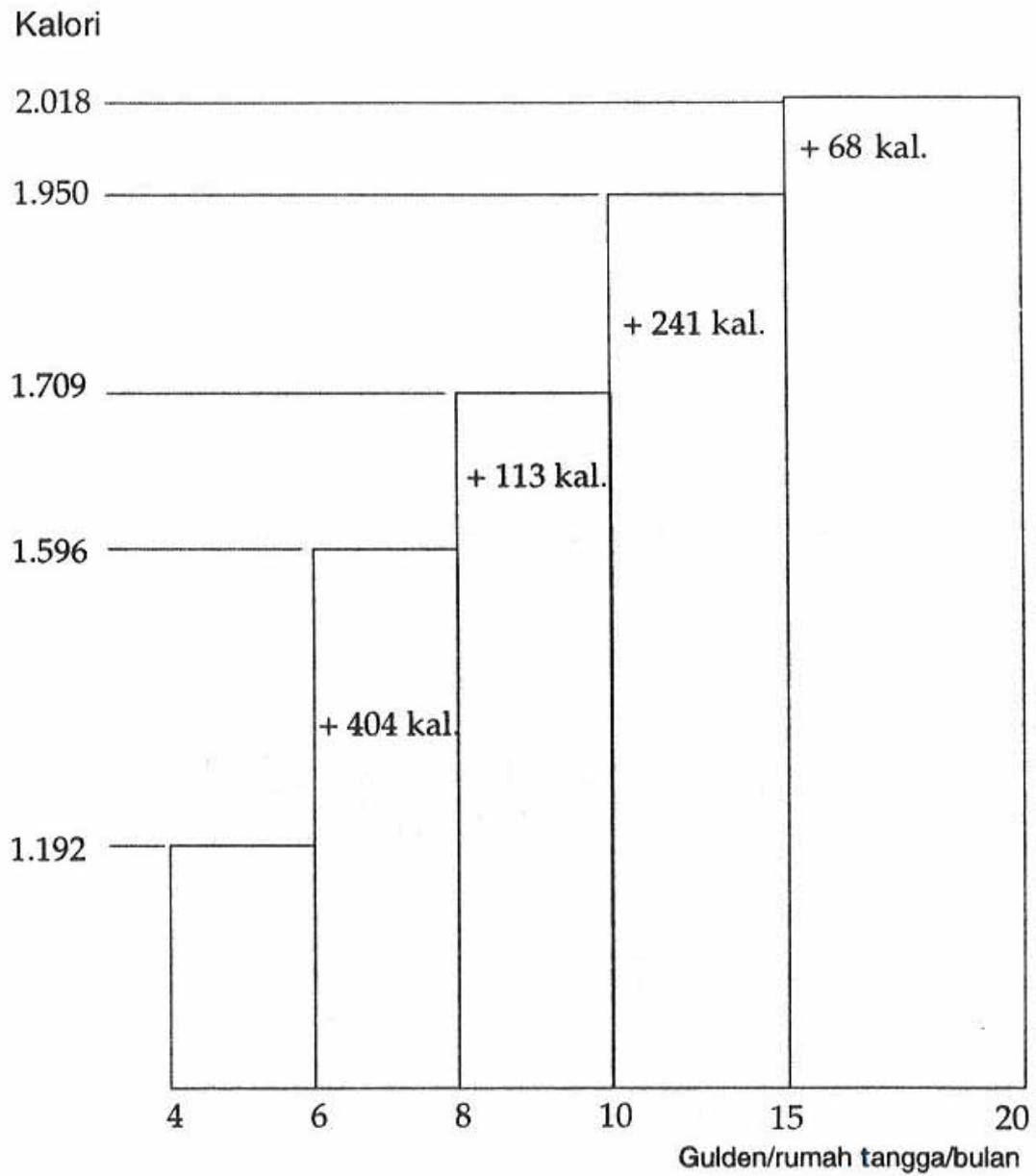
Jika "jurang kemiskinan Rp 1.020 milyar akan diatasi dalam waktu 10 tahun", maka setiap tahun selama masa 10 tahun mendatang, golongan miskin perlu mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 102 milyar atau Rp 7.466/tahun per rumah tangga miskin (atau 62 kg nilai tukar beras per tahun per rumah tangga). Jika kita hanya sanggup mengeluarkan Rp 51 milyar setahun, proses itu makan waktu 20 tahun.

Penyaluran tambahan pendapatan itu dapat tersalur lewat peluang tambahan nafkah dengan bekerja (tambah modal usaha, misalnya dari "kredit candak kulak", dari bekerja dalam proyek padat karya, kerajinan atau industri rumah tangga, usaha jasa-jasa, perbaikan pekarangan dan sebagainya), sesuai pola bekerja golongan miskin yang berbeda untuk desa dan kota.

Lumbung paceklik dengan pinjaman pangan di musim paceklik dan bunga rendah juga akan menolong. Pula taman gizi untuk anak balita (bawah lima tahun) dan ibu mengandung, jika suplemen pangan diberikan untuk minimal 3 bulan dalam setahun, selama para ibu tersebut mendapat pendidikan gizi/kesejahteraan rumah tangga (PKK).

Yang menjadi masalah adalah, apakah penyaluran tambahan peluang nafkah dan cara lain kepada golongan miskin itu dapat diberikan tanpa membimbing mereka dalam wadah-wadah swadaya kelompok? Ini akan berarti semata-mata menjadikan mereka "golongan sasaran" yang dilayani "pekerja sosial" yang makan biaya.

Grafik



TABEL II

	Jawa	Daerah lain	Indonesia
1. Penduduk	84 juta 17,87 juta rmt)	49 juta (8,91 juta rmt)	133 juta (26,78 juta rmt)
2. Pendapatan daerah			
a) gross (66% = pend.rmt)	Rp. 6.342.872 jt	Rp. 4.125.221 jt	Rp. 10.468.093 jt
b) nett (77% = pend. rmt)	Rp. 5.581.728 jt	Rp. 3.535.904 jt	Rp. 9.117.632 jt
3. Jumlah penduduk miskin			
a) desa	38,97 juta (58,6%)	16,73 juta (41,6%)	55,70 juta
b) Kota	6,78 juta (42,5%)	3,84 juta (43,5%)	10,62 juta
Jumlah	45,75 juta (55,5%) (=9,92 juta rmt)	20,57 juta (41,9%) (=3,74 juta rmt)	66,32 juta (=13,66 jt rmt)
4. Jurang kemiskinan :			
a) desa	Rp. 585.729 juta	Rp. 210.827 juta	Rp. 1.019.955 jt
b) kota	Rp. 149.678 juta	Rp. 73.720 juta	atau 11,2% dari net. national product
Jumlah	Rp. 735.407 juta	Rp. 284.547 juta	

Table 4.5: LEVEL AND TRENDS OF POVERTY IN INDONESIA.
1970-1976, BASED ON VARIOUS POVERTY THRESHOLDS:
SAJOGYO'S ESTIMATES AND OUR CORRECTIONS.

Poverty Thresholds (annual per capita expenditures, in rice equivalent (1))	Sajogyo's Estimates January - April 1970		Sajogyo's Estimates January - April 1976		Estimates Using Per Capita Distribution and Price of Rice/1 January - April (6)		Estimates Using Per Capita Distribution and 9 Essen- tial Commodities index 1 January - April 1976 (8)	
	% of Total (2)	Number (millions) (3)	% of Total (4)	Number (millions) (5)	% of Total (6)	Number (millions) (7)	% of Total (8)	Number (millions) (9)
JAVA - Urban								
Poor (480 kg)	55.90	7.13	42.50	6.89	45.99	6.81	35.85	5.31
Very Poor (360 kg)	43.70	5.37	28.49	4.62	27.68	4.10	14.68	2.18
Destitute (270 kg)	26.05	3.32	17.75	2.88	13.73	2.03	8.79	1.30
JAVA - Rural								
Poor (320 kg)	61.00	37.97	58.60	40.48	57.11	38.48	47.95	32.31
Very Poor (240 kg)	39.49	24.58	39.78	27.48	33.92	22.86	25.31	17.06
Destitute (180 kg)	20.93	13.03	24.95	17.24	17.14	11.55	13.06	8.80
OUTSIDE JAVA - Urban								
Poor (480 kg)	61.44	4.43	43.51	4.12	42.41	3.66	42.71	3.68
Very Poor (360 kg)	38.96	2.81	27.13	2.57	22.83	1.97	23.04	1.99
Destitute (270 kg)	20.78	1.50	14.55	1.38	10.18	.88	10.27	.89
OUTSIDE JAVA - Rural								
Poor (320 kg)	44.80	15.77	41.65	16.83	35.63	13.98	34.21	13.42
Very Poor (240 kg)	27.78	9.78	25.83	10.44	19.54	7.67	18.61	7.30
Destitute (180 kg)	15.01	5.28	14.44	5.83	9.32	3.66	8.97	3.52

Source : Sajogyo. Op.Cit.

Corrected estimates use susenas, 1976 data and 9 Essential Commodities Index form Table 4.1.

1. Population totals for urban and rural Indonesia are taken from the 1976 intercensal Survey. The division of each into Java and Outside Java is based on proportions from the susenas, 1976.

Dikutip dari : Document of the World Bank.

Report No. 2378 - IND, Employment and Income Distribution
in Indonesia, February 20, 1979.



Prof. Dr. Ir. Sajogyo lahir di Karanganyar pada tanggal 21 Mei 1926. Gelar Sarjananya diperoleh pada tahun 1955 dari Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor dan Doktor Ilmu Pertanian dari universitas yang sama pada tahun 1957 dengan disertasi berjudul: *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung, Lampung*. Sejak tahun 1963, Sajogyo adalah gurubesar Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Tahun 1964-1972 memimpin Badan Kerja Survey Agro-Ekonomi, Departemen Pertanian. Kini menjabat Kepala Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor sejak 1972; dan Ketua Bidang Keahlian Sosiologi Pedesaan pada Fakultas Pascasarjana IPB sejak tahun 1975 hingga kini. Dari sekian banyak tulisannya, beberapa telah diterbitkan yaitu: *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung, Lampung* (dengan nama lama Kampto Utomo, 1975); *Menuju Gizibaik yang Merata di Pedesaan dan di Kota* (1980, 1981); *Sosiologi Pedesaan, kumpulan bacaan* (1982).